

RANCANGAN UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

(Proposed Bill on Personal Data Protection)

SLIDE 1 - TITLE

RUU PDP

SLIDE 2 -

Apa itu RUU PDP?

RUU PDP merupakan rancangan undang-undang yang bertujuan untuk menjamin keamanan data pribadi di Indonesia. Hal ini akan membuat perusahaan digital mengambil tanggung jawab mutlak untuk memastikan keamanan data pribadi penggunanya.

RUU PDP mengakui hak pemilik data pribadi sebagai hak asasi manusia. Undang-Undang ini berlaku untuk penyelenggaraan semua jenis data pribadi warga negara Indonesia yang dilakukan oleh orang, badan hukum, badan usaha, instansi penyelenggara negara, badan publik, atau organisasi kemasyarakatan lainnya.

What is RUU PDP?

RUU PDP or translate roughly to the "Proposed Bill on Personal Data Protection" is a draft law that aims to ensure the security of personal data in Indonesia. This will make digital companies take absolute responsibility for ensuring the security of their users' personal data.

RUU PDP recognizes the right of the owner of personal data as a human right. This law applies to the administration of all types of personal data of Indonesian citizens by persons, legal entities, business entities, state administrators, public bodies, or other social organizations.

SLIDE 3 -

Mengapa kita butuh RUU PDP?

RUU PDP merupakan upaya pemerintah untuk melindungi dan menjamin hak sipil warga terkait privasi atas data pribadinya yang memiliki keterkaitan langsung dengan hak asasi manusia lainnya. Undang-undang ini diyakini dapat menjamin rasa aman bagi masyarakat dalam menggunakan aplikasi dan platform berbasis internet tanpa disalahgunakan atau dilanggar hak pribadinya.

PDP melindungi aset informasi yang kini menjadi primadona ekonomi dunia saat ini. Dengan pengelolaan data yang baik, inovasi dan ekonomi digital akan berkembang pasti karena hak semua orang terukur dan terlindungi. Dengan adanya UU PDP, Indonesia dapat menjalankan interaksi antarbangsa dengan baik karena PDP kini sudah menjadi agenda dan prasyarat perdagangan dunia

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi akan mengatur hak dan kewajiban pemilik data dan individu atau lembaga yang mengumpulkan dan memproses data. Melalui peraturan ini, petugas perlindungan data akan ditugaskan atau menjadi pengawas perlindungan data pribadi.

Why do we need RUU PDP?

RUU PDP is an attempt by the government to protect and guarantee citizens' civil rights regarding the privacy of their personal data which have a direct relationship with other human rights. This law is believed to guarantee a sense of security for the public in using internet-based applications and platforms without being abused or violated by their personal rights.

PDP is sealing important information about current global economic trends at this moment. With good data management, innovation and the digital economy will thrive because everyone's rights are measured and

protected. With the PDP Law, Indonesia can carry out interactions between nations well because PDP has now become an agenda and prerequisite for world trade.

The Personal Data Protection Act will regulate the rights and obligations of data owners and individuals or institutions that collect and process data. Through this regulation, data protection officers will be assigned or become supervisors for the protection of personal data.

SLIDE 4 -

RUU PDP mengidentifikasi 6 macam data

1. Identitas pribadi
2. Data kependudukan dan kewarganegaraan
3. Data komunikasi
4. Data perjalanan
5. Data medis
6. Data ekonomi

RUU PDP identifies 6 types of data

1. Personal identity
2. Population and citizenship data
3. Communication data
4. Travel data
5. Medical data
6. Economic data

SLIDE 5 -

Hak yang didapatkan oleh pemilik data pribadi

1. Mengajukan permintaan akses yang memadai dan salinan atas data pribadinya kepada penyelenggara yang mengelola data pribadinya.
2. Memperbaiki kesalahan, ketidakakuratan dan memperbaharui data pribadi yang berada di dalam penyelenggaraan penyelenggara data pribadi.
3. Melengkapi data pribadi sebelum data pribadi tersebut dikelola oleh penyelenggara data pribadi.
4. Memusnahkan data miliknya (tidak memiliki nilai guna, telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan jadwal retensi arsip, tidak ada peraturan undang undang yang melarang, tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara)
5. Menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran terhadap data pribadinya berdasarkan undang undang ini ke pengadilan
6. Menarik kembali persetujuan penyelenggaraan data yang telah diberikan pada penyelenggara data dengan pemberitahuan tertulis.

Rights obtained by the owner of personal data

1. Requesting adequate access and a copy of their personal data to the organizer who manages their personal data.
2. Correcting errors, inaccuracies and updating personal data that are in the administration of personal data providers.
3. Complete personal data before the personal data is managed by the personal data provider.
4. Destroying their data (it has no use value, has expired its retention and the information is destroyed based on the archive retention schedule, there is no law prohibiting it, it is not related to the completion of a case process)
5. Demand and receive compensation for violations of their personal data based on this law to court

6. Withdraw the data management approval that has been given to the data operator with a written notification.

SLIDE 5 -

Hukum pidana yang diatur dalam RUU PDP

Mengacu pada pasal 42 RUU PDP, pelaku yang mencuri atau memalsukan data pribadi dengan tujuan kejahatan, akan dipidana paling lama 1 tahun dan dengan maksimal Rp 300 juta. Di pasal selanjutnya, pidana pokok dapat ditingkatkan dendanya menjadi maksimal Rp 1 miliar. Pidana pokok ini ditingkatkan jika pelanggaran dilakukan oleh badan usaha.

The criminal law stipulated in RUU PDP

Referring to article 42 of RUU PDP, the perpetrator who steals or falsifies personal data for the purpose of crime, will be sentenced to a maximum of 1 year and a maximum of Rp. 300 million. In the next article, the fine can be increased to a maximum of Rp. 1 billion. This basic punishment is increased if the violation is committed by a business entity.

SLIDE 7 -

Kemajuan apa yang terlihat pada tahun 2020?

Dalam rapat paripurna pembukaan Sidang Periode II 2020-2021 yang digelar November lalu, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pembahasan RUU PDP akan segera diburu. DPR menargetkan pembahasan RUU PDP sudah selesai pada Masa Sidang Kedua. Namun, rapat untuk membahas inventarisasi masalah di Komisi I dengan pemerintah belum selesai.

Dalam rapat paripurna pada 7 Desember 2020 yang berlangsung di Gedung DPR, DPR memutuskan untuk memperpanjang waktu pembahasan RUU PDP. Permintaan perpanjangan waktu pembahasan RUU PDP disetujui oleh anggota DPR. Pembahasan RUU PDP akan dilakukan hingga Masa Sidang III Tahun 2020-2021. Sedangkan Masa Uji Coba Kedua 2020-2021 akan berakhir pada pertengahan Desember.

What progress has been seen in 2020?

In a plenary session on December 7, 2020 which was held at the DPR Building, the DPR decided to extend the time for deliberation of the RUU PDP. The DPR members approved the request for an extension of the deliberation period for the RUU PDP. The discussion of the RUU PDP will be carried out until the III Trial Period 2020-2021. Meanwhile, the Second Trial Period 2020-2021 will end in mid-December.

In the plenary meeting for the opening of the 2020-2021 Session Period II which was held last November, the Chairman of the DPR, Puan Maharani, said that the discussion on the RUU PDP would soon be rushed. The DPR targets that the discussion of the RUU PDP will be completed during the Second Session Period. However, the meeting to discuss the inventory of problems in Commission I with the government has not yet been completed.

SOURCE

<https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt561f74edf3260/ruu-pelindungan-data-pribadi-tahun-2020>
<https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4752/Rancangan%20UU%20PDP%20Final%20%28Setne g%20061219%29.pdf>
<https://nasional.kontan.co.id/news/rapat-paripurna-dpr-putuskan-perpanjang-pembahasan-ruu-perlindunga n-data-pribadi>
<https://www.antaranews.com/berita/1888292/ruu-pdp-ditargetkan-selesai-awal-tahun-depan>
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/09/184724165/apa-itu-ruu-pelindungan-data-pribadi?page=all>
<https://www.antaranews.com/berita/1607946/kenapa-perlu-perlindungan-data-pribadi->

<https://money.kompas.com/read/2020/11/16/170500826/dalam-ruu-pdp-fintech-bisa-kena-sanksi-pidana-jika-data-pribadi-bocor>